

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN  
PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BANTAENG**

**SKRIPSI**



**FITRIA RAHMAN**

**105711105319**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR**

**2023**

**KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**JUDUL PENELITIAN:**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN  
PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BANTAENG**

**SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan Oleh:**

**FITRIA RAHMAN**

**105711105319**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi Pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR**

**2023**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**“Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar”**

**(Q.S Ali-Imran;142)**

**“Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”**

**(Q.S Muhammad;7)**

### **PERSEMBAHAN**

**Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas Ridho serta Karunia-Nya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.**

**Alhamdulillah Rabbil'alamin**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta dan orang-orang yang kusayangi dan almamaterku**

### **PESAN DAN KESAN**

**Setelah kesulitan pasti ada kemudahan dan setelah badai hujan pasti ada pelangi. Banyak hal yang perlu dilalui untuk bisa ke tahap ini, kendala dan rintangan pasti ada tetapi berkat dorongan dan semangat yang saya dapatkan skripsi ini bisa saya selesaikan.**



PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bantaeng  
Nama : **Fitria Rahman**  
No. Stambuk/NIM : 105711105319  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 29 Juli 2023 di Program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 Juli 2023

Pembimbing I  
Menyetujui,

Pembimbing II

Ismail Rasulong, SE., M.M  
NIDN : 0905107302

A. Nur Achsanuddin UA, SE., M.Si  
NIDN : 0920098604



Dekan  
Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si  
NBM: 651 507

Mengetahui :  
Ketua Program Studi  
Asdar, SE., M.Si  
NBM: 128 6845



**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama: Fitria Rahman Nim: 105711105319 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0009/SK-Y/60201/091004/2023 M, Tanggal 11 Muharram 1445 H/ 29 Juli 2023 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 11 Muharram 1445 H

29 Juli 2023 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M,Si  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE.,M.Acc  
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Muhammad Ikram Idrus, M.Si  
2. Naidah, SE.,M.Si  
3. Ismail Rasulong, SE.,M.M  
4. Warda, SE.,M.E

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si**  
NBM: 651 507



PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitria Rahman  
Stambuk : 105711105319  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Judul Skripsi : Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bantaeng

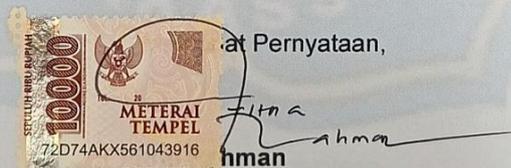
Dengan ini menyatakan bahwa :

***Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.***

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

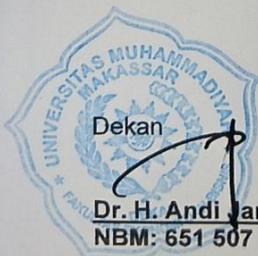
Makassar, 11 Muharram 1445 H

29 Juli 2023 M



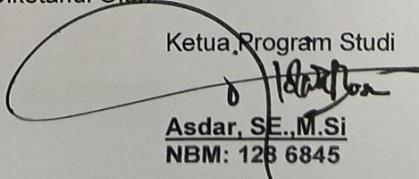
NIM: 105731102819

Diketahui Oleh:



Dekan

Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si  
NBM: 651 507



Ketua Program Studi

Asdar, SE.,M.Si  
NBM: 128 6845

**HALAMAN PERNYATAAN  
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitria Rahman  
NIM : 105711105319  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bantaeng**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawar dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 11 Muharram 1445 H

29 Juli 2023 M

Yang Membuat Pernyataan,



**Fitria Rahman**  
**105731102819**

## KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bantaeng”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Rahman dan Ibu Kasnia yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Asdar, SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM. selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak A. Nur Achsanuddin UA, SE., M.Si, selaku Pembimbing II yang telah berkenan mengarahkan, membimbing serta membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2019 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Kepala kantor dan jajaran staf Badan Pusat Statistik dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng yang telah membantu penulis dalam pengambilan data sehingga skripsi ini bisa disusun.
10. Badan Pimpinan Harian Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Periode 2022-2023 yang terus memberikan semangat, doa dan terus membersamai proses penulis.
11. Adik-adik Departemen dan Kader PIKOM IMM FEB yang terus mengirimkan doa ikhlas disetiap langkah penulis.

12. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 22 Juni 2023

Penulis

Fitria Rahman

## ABSTRAK

**FITRIA RAHMAN. 2023. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bantaeng. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Di bimbing oleh : Ismail Rasulong dan A. Nur Achsanuddin UA**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk usia kerja, jumlah kunjungan wisatawan dan produk domestik regional bruto terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Bantaeng. Sampel yang diambil dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang didasarkan pada data konkrit yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian data diolah dengan menggunakan perhitungan statistik melalui aplikasi *Statistical Package for the Social Science* (SPSS) mengenai pengaruh jumlah penduduk usia kerja, jumlah kunjungan wisatawan, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap penerimaan pajak daerah yang telah dibahas dari bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa jumlah penduduk usia kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, jumlah kunjungan wisatawan juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah serta Produk Domestik Regional Bruto memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

***Kata Kunci : Jumlah Penduduk Usia Kerja, Jumlah Kunjungan Wisatawan, Produk Domestik Regional Bruto, Penerimaan Pajak Daerah.***

## **ABSTACT**

**FITRIA RAHMAN. 2023. Factors Influencing Regional Tax Revenue in Bantaeng Regency. Thesis. Department of Development Economics. Faculty of Economics and Business Muhammadiyah Makassar University. Supervised by: Ismail Rasulong and A. Nur Achsanuddin UA**

*This study aims to determine the effect of the working age population, the number of tourist visits and gross regional domestic product on regional tax revenues in Bantaeng Regency. Samples were taken from the Central Bureau of Statistics and the Tourism Office of Bantaeng Regency. The type of data used in this study is quantitative data based on concrete data related to the problem under study. In this study, the data sources used in data collection include secondary data. Based on the research results the data is processed using statistical calculations through the Statistical Package for the Social Science (SPSS) application concerning the effect of the working age population, the number of tourist visits, and the Gross Regional Domestic Product on regional tax revenues which have been discussed from the previous chapter, the authors draw the conclusion that the working age population has a positive and significant effect on local tax revenues, the number of tourist visits also has a positive and significant effect on local tax revenues and Gross Regional Domestic Product has a positive and significant effect on local tax revenues.*

**Keywords: Total Population of Working Age, Number of Tourist Visits, Gross Regional Domestic Product, Local Tax Revenue.**

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>17</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	<b>17</b>
B. Rumusan Masalah .....	<b>26</b>
C. Tujuan Penelitian .....	<b>26</b>
D. Manfaat Penelitian .....	<b>27</b>
1. Manfaat Teoritis .....	<b>27</b>
2. Manfaat Praktis .....	<b>27</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>28</b>
A. Tinjauan Teori .....	<b>28</b>
1. Pajak .....	<b>28</b>
2. Pajak Daerah.....	<b>31</b>
3. Penduduk.....	<b>33</b>
4. Wisatawan .....	<b>35</b>
5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	<b>36</b>
B. Tinjauan Empiris .....	<b>37</b>
C. Kerangka Pikir.....	<b>42</b>
D. Hipotesis .....	<b>45</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>46</b>
A. Jenis Penelitian .....	<b>46</b>
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	<b>46</b>

C. Jenis Dan Sumber Data .....	47
D. Populasi Dan Sampel .....	47
E. Metode pengumpulan Data .....	48
F. Definisi Operasional Variabel .....	49
G. Metode Analisis Data .....	50
H. Uji Hipotesis .....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	53
1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng .....	53
2. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng .....	60
B. Penyajian Data Hasil Penelitian .....	63
1) Regresi Linear Berganda .....	65
2) Uji Koefisien Determinasi .....	67
3) Uji Hipotesis .....	68
C. Analisis dan Interpretasi (Pembahasan) .....	69
<b>PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>77</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>	<b>988</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bantaeng Tahun 2015-2020.....	21
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian .....	44
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik.....	58



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017-2021 .....	20
Tabel 1.2 Kependudukan Kabupaten Bantaeng, 2021 .....	22
Tabel 1.3 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Bantaeng.....	24
Tabel 2.1 Tinjauan Empiris .....	37
Tabel 4.1 Penduduk Usia Kerja Kabupaten Bantaeng Tahun 2013-2022.....	63
Tabel 4.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Bantaeng Tahun 2013-2022 .....	64
Tabel 4.3 PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bantaeng atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2013 - 2022 (Juta Rupiah).....	64
Tabel 4.4 Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013-2020 .....	65
Tabel 4.5 Coefficients <sup>a</sup> .....	66
Tabel 4.6 Model Summary.....	67

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tantangan perkembangan global. Penyelenggaraan pemerintah dan pembiayaan pembangunan, pemerintah berusaha untuk menggali dana, baik dengan dana yang berasal dari masyarakat ataupun dari pemerintah itu sendiri. Penerimaan pemerintah meliputi pajak, hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya. Pendapat lain mengatakan bahwa penerimaan Negara berasal dari : (a) Pungutan, (b) Pinjaman, dan (c) Penciptaan uang baru. Selain itu dikatakan pula bahwa apa yang diterima pemerintahan suatu Negara dapat bermacam-macam antara lain pajak, retribusi, hasil perusahaan Negara, dinas-dinas, pinjaman dan *grant* (jika ada). Penerimaan negara dapat dibedakan dari penerimaan pajak dan bukan pajak jika disederhanakan.

Menurut UU Nomor 9 Tahun 2018, "Penerimaan Negara Bukan Pajak" disebut juga "PNBP" adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan sebagai imbalan atas manfaat langsung atau tidak langsung dari jasa atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pungutan tersebut menjadi penerimaan bagi pemerintah pusat yang terpisah dari penerimaan pajak dan hibah serta dikelola melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Tentu saja, sumber pendapatan yang dapat diandalkan diperlukan bagi pemerintah untuk menjalankan tugasnya di bidang pembangunan dan pemerintahan.

Sejak 1 Januari 2001, otonomi daerah diberlakukan di Indonesia. Pemerintah dituntut untuk lebih berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat memenuhi pembiayaan pengeluaran daerah. Penerimaan daerah merupakan komponen penting yang harus dilaksanakan pemerintah daerah untuk mencapai kemandirian daerah dalam pengelolaan sumber daya. Pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Utami et al., 2014).

Kemampuan keuangan daerah merupakan indikasi utama bahwa ia mampu melakukan otonomi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan distribusi keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar bagi sistem pemerintahan Negara. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan /daerahnya sendiri dengan sesedikit mungkin mengandalkan bantuan dari

pemerintah pusat. (Ririhena.,2017). Dalam Undang – undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah menerangkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.

Keserasian keuangan antara pemerintah federal dan pemerintah daerah, yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 6 Ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain:

- a. Pajak Daerah,
- b. Retribusi daerah,
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- d. Pendapatan daerah lainnya yang secara hukum sah atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah (UU No.28 Tahun 2009). Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut (Ririhena.,2017). Pajak di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 34 tahun 2000 terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupa9ten/kota. Jenis jenis Pajak Provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air permukaan. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel,

pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak parkir.

Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang mendapat otonomi daerah untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Kabupaten Bantaeng yang dikenal dengan Butta Toa terletak di kawasan pesisir yang membentang sepanjang 21,5 kilometer dari timur ke barat. Terdapat pusat kota pesisir yang terdiri dari 8 kecamatan yang terbagi menjadi 21 kelurahan dan 46 desa. Kabupaten Bantaeng terus bersaing dengan daerah lain dengan mengembangkan daerahnya. Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya adalah dengan mengoptimalkan pemungutan pajak daerah.

**Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>Pajak Daerah</b>
2017	55.464.716.357,60	10.214.439.850,00
2018	94.776.587.126,00	11.610.612.835,00
2019	107.143.247.098,99	18.361.699.088,50
2020	110.462.053.507,71	24.365.468.093,70
2021	105.872.597.333,20	17.357.428.625,50

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng, 2022

Dari tabel 1.1 terlihat bahwa kontribusi pajak daerah Kabupaten Bantaeng dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terhadap pendapatan asli daerah mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pajak

Daerah merupakan komponen terbesar dari pendapatan asli daerah hal ini dapat dilihat pada jumlah kontribusi pajak daerah dan pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.



Sumber : *Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng, 2022*

**Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bantaeng  
Tahun 2015-2020**

Dari gambar 1.1 yang menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Bantaeng dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang dimana pada tahun 2019 menjadi laju pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 10,75 persen. Pertumbuhan ekonomi dari tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 0,52 Persen, hal ini kemudian menjadi tugas penting pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk kembali meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantaeng dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada, termasuk pengoptimalan pendapatan asli daerah lewat pajak daerah.

Terdapat beberapa factor yang dapat mempengaruhi pajak daerah,yaitu jumlah wisatawan domestic dan mancanegara yang berkunjung (Tahwin.,2013). Selain itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh secara langsung terhadap pajak daerah di Kota Denpasar (Marliyanti dan Arka.,2014). Juga jumlah penduduk,Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh yang positif terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah (Sania et al,2018) . Setiap daerah memiliki potensi yang dapat menjadi factor pendorong dalam peningkatan pajak daerah yang dimiliki.

Perkembangan jumlah penduduk dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah,karena seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk pada suatu daerah maka dapat berpotensi meningkatkan wajib pajak sehingga nantinya penerimaan pajak daerah juga meningkat (Saputra et al., 2014).

**Tabel 1.2 Kependudukan Kabupaten Bantaeng,2021**

Kecamatan	Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Per 2010-2020	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk Per Km <sup>2</sup>	Rasio Jenis Kelamin
<b>Bissappu</b>	35.655	1.13	18.02	1085.72	97.90
<b>Uluere</b>	11.586	0.27	5.85	172.18	100.69
<b>Sinoa</b>	13.095	0.66	6.62	304.53	98.98
<b>Bantaeng</b>	39.706	0.37	20.07	1376.29	98.39
<b>Eremerasa</b>	21.467	1.15	10.85	476.94	98.60
<b>Tompobulu</b>	24.943	0.46	12.60	323.98	95.46
<b>Pajukukang</b>	32.524	0.80	16.44	665.11	98.02
<b>Gantarangkeke</b>	18.910	1.52	9.56	357.13	96.49
<b>Jumlah</b>	<b>197.886</b>	<b>0.79</b>	<b>100.00</b>	<b>499.93</b>	<b>97.88</b>

Sumber : *Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng, 2022*

Berdasarkan hasil dari proyeksi sensus penduduk 2020 Kabupaten Bantaeng, jumlah penduduk di Kabupaten Bantaeng adalah sebanyak 197.886 jiwa. Dibandingkan dengan jumlah hasil sensus 2020, penduduk Kabupaten Bantaeng mengalami pertumbuhan sebesar 0,79 Persen. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bantaeng berdasarkan data hasil proyeksi sensus penduduk tahun 2020 mencapai 499,93 jiwa/km<sup>2</sup>.

Angka rasio jenis kelamin tahun 2021 berdasarkan data proyeksi sensus penduduk tahun 2020 adalah 97,88 artinya setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 97 sampai 98 orang penduduk laki-laki. Berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk Kabupaten Bantaeng tertinggi berada pada kelompok umur 15-19 tahun yaitu sebanyak 17.580 jiwa dan terendah berada pada kelompok umur 70-74 tahun yaitu sebanyak 3.255 jiwa. Maka dari data yang tersaji, peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya berarti subjek pajak terus bertambah dan dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Bantaeng.

Selain itu, Kabupaten Bantaeng juga memiliki beberapa objek wisata yang diminati oleh wisatawan entah itu wisatawan domestic maupun mancanegara diantaranya adalah peninggalan sejarah yang didokumentasikan dalam buku-buku sejarah. Tidak mengherankan jika pemerintah daerah tertarik pada pariwisata. Berbagai tempat wisata alam menarik, seperti Pemandian Air Terjun Bissappu. Pemeliharaan juga dilakukan pada Peninggalan sejarah seperti Balla Tujua, yang menjadi kebanggaan masyarakat. Dengan demikian, Kabupaten Bantaeng mendapatkan kontribusi pendapatan daerah melalui penerimaan pajak

daerah di bidang pariwisata karena kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bantaeng. Kontribusi pariwisata terhadap pendapatan daerah akan meningkat sebagai hasil dari pertumbuhan sektor yang sukses. Oleh karena itu, industri pariwisata ini merupakan salah satu yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap pendapatan pemerintah daerah dan masyarakat dengan memberikan kontribusi dalam proses pembangunan daerah.

**Tabel 1.3 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Bantaeng**

No	Tahun	Jumlah Kunjungan Wisatawan
1	2013	44.778
2	2014	82.128
3	2015	80.016
4	2016	73.699
5	2017	76.971
6	2018	90.340
7	2019	87.626
8	2020	67.733
9	2021	70.687
10	2022	90.214

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng, 2023

Menurut data yang diperoleh, setiap tahunnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantaeng mengalami peningkatan. Namun, proporsi pengunjung asing ke Kabupaten Bantaeng dibandingkan pengunjung domestik masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan wisatawan mancanegara lebih sedikit mengunjungi tempat wisata di Kabupaten Bantaeng dibandingkan daerah lain.

Kunjungan wisatawan memiliki pengaruh untuk pengembangan industri pariwisata dan peningkatan pendapatan asli daerah sehingga wisatawan domestic maupun mancanegara tertarik untuk berkunjung. Jumlah kunjungan wisatawan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, maka secara tidak langsung berdampak pada meningkatnya pajak hotel dan restoran yang merupakan bagian dari pajak daerah (Pertwi.,2014).

Selain jumlah penduduk dan jumlah kunjungan wisatawan, faktor lain yang dapat mempengaruhi adalah Produk Domestik Regional Bruto yang disingkat dengan PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah barang atau jasa yang diperoleh dari suatu wilayah/daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah semua produk yang dihasilkan oleh suatu daerah selama periode waktu tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu metode untuk menentukan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai produk domestik bruto suatu wilayah, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan tolak ukur yang digunakan pemerintah untuk merumuskan kebijakan pembangunan ke depan. Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah (Widiyanti dan Dewanti., 2017).

Maka dari itu pemerintah perlu berupaya untuk terus meningkatkan pengoptimalan pemungutan pajak daerah, agar penerimaan pemerintah terus meningkat sehingga dapat memperlancar pembangunan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa peningkatan penerimaan pendapatan di daerah

perlu diperhatikan karena pajak daerah dapat memberikan peluang yang besar bagi 9Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Bantaeng”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka dapat diperoleh rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Apakah jumlah penduduk usia kerja berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bantaeng periode 2013- 2022?
2. Apakah jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bantaeng periode 2013- 2022?
3. Apakah Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bantaeng periode 2013- 2022?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk usia kerja terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bantaeng periode 2013- 2022.

2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bantaeng periode 2013- 2022.
3. Untuk mengetahui Produk Domestik Regional Bruto terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bantaeng periode 2013- 2022.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi dan memperkaya wawasan pembaca terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bantaeng yang dapat dijadikan landasan untuk kebutuhan penulisan ataupun penelitian sejenis.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **2.1 Bagi Penulis**

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bantaeng.

###### **2.2 Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan bisa dapat memberikan manfaat,maupun masukan-masukan yang berguna bagi pemerintah daerah sehingga menjadi motivasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak daerah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Teori

##### 1. Pajak

###### 1.1 Pengertian Pajak

Dalam bukunya "Pengantar Hukum Perpajakan", R. Santoso Brotodihardjo, S.H. mengutip pendapat sejumlah ahli pajak:

Dalam bukunya tahun 1906, "Traite de la Science des Finance", seorang akademisi Prancis bernama Leroy Beaulieu "Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup pemerintah".

Menurut *Deutsche Reichs Abgabenordnung* (RAO-1919), pajak didefinisikan sebagai bantuan keuangan insidental atau periodik yang dikumpulkan oleh suatu badan umum (Negara) untuk memperoleh penghasilan pada saat tatbestand (target perpajakan) terjadi sebagai akibat dari undang-undang. Undang-undang telah menciptakan utang pajak.

Dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Perpajakan dan Pajak Penghasilan, Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. mendefinisikan pajak sebagai iuran perseorangan kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak menerima jasa timbal

(kontra prestasi) yang dapat langsung ditanggapi dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Antika, F.N. et al. (2020:408) Pajak adalah tulang punggung bangsa. Penerimaan pajak Indonesia digunakan untuk memungkinkan pembangunan dan kontrol pemerintah. Pembiayaan pemerintah berbasis pajak menempati urutan tertinggi di antara sumber pembiayaan lain yang mendukung pendapatan pemerintah Indonesia.

Menurut Supit, N. L dkk (2015:201) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung.

## 1.2 Fungsi Pajak

Penjelasan tentang fungsi pajak akan diawali dengan perbincaraan tentang tujuan pajak. Antara fungsi dan tujuan tentu saja memiliki pengertian yang tidak sama. Tujuan pemungutan pajak adalah mencapai kondisi ideal dari suatu Negara. Negara memerlukan pajak untuk memutar roda pemerintahan demi kelangsungan hidup Negara dan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat seluruhnya.

Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak dalam bukunya perpajakan mengemukakan ada dua fungsi pajak, yaitu :

- 1) Fungsi *Budgetir* adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi Mengatur (*regulerend*) adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### 1.3 Pengelompokan Pajak

#### 1.3.1 Menurut Golongannya

- a) Pajak langsung, yaitu pajak yang tidak dapat dibebankan kepada orang lain dan harus dibayar sendiri oleh wajib pajak.  
Contoh: Pajak Penghasilan.
- b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dikenakan pada orang lain atau didelegasikan kepada mereka.  
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

#### 1.3.2 Menurut Sifatnya

- a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang didasarkan atau berasal dari subjek keberadaannya sendiri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan
- b) Pajak Objektif, yaitu suatu bentuk pajak yang ditetapkan berdasarkan obyeknya tanpa memandang keadaan pribadi wajib pajak. Contoh: Barang mewah dikenakan pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai.

#### 1.3.3 Menurut Lembaga Pemungutannya

- a) Pajak Pusat, yang dipungut dan digunakan oleh pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga negara, Contoh: Bea Meterai, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Barang Mewah.
- b) Pajak Daerah, khususnya pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.  
Pajak daerah meliputi:
  - 1) Pajak provinsi: Pajak bensin dan kendaraan bermotor.

- 2) Pajak Kota/Kabupaten, misalnya: Pajak hotel, restoran, dan hiburan.

## **2. Pajak Daerah**

### **2.1 Pengertian Pajak Daerah**

Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mendefinisikan pajak daerah sebagai berikut : “ Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang tentang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mardiasmo mendefinisikan pajak daerah sebagai berikut : “pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang , dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **2.2 Jenis – Jenis Pajak Daerah**

Menurut Mardiasmo Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sebagai berikut :

- a. Pajak Provinsi, terdiri atas :
  - 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
  - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - 4) Pajak Air Permukaan;
  - 5) Pajak Rokok;
- b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:
- 1) Pajak Hotel;
  - 2) Pajak Restoran;
  - 3) Pajak Hiburan;
  - 4) Pajak Reklame;
  - 5) Pajak Penerangan Jalan;
  - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - 7) Pajak Parkir;
  - 8) Pajak Air Tanah;
  - 9) Pajak Sarang Burung Walet;
  - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
  - 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

### **2.3 Tarif Pajak Daerah**

Tarif pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan paling tinggi berbeda untuk setiap jenis pajak, yaitu;

- a. Pajak kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 10%
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 20%
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 10%
- d. Pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi 10%

- e. Pajak rokok ditetapkan paling tinggi 10%
- f. Pajak hotel ditetapkan paling tinggi 10%
- g. Pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10%
- h. Pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 35%
- i. Pajak reklame ditetapkan paling tinggi 25%
- j. Pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi 10%
- k. Pajak mineral bukan logam dan bantuan ditetapkan paling tinggi 25%
- l. Pajak parkir ditetapkan paling tinggi 30%
- m. Pajak air tanah ditetapkan paling tinggi 20%
- n. Pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi 10%
- o. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%
- p. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%.

### **3. Penduduk**

Penduduk adalah jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yang fertilitas dan migrasi (Said dan Mahsunah,2013) . Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6 ayat 2 menjelaskan bahwa penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Menurut Ahmad Khoiri (2021), factor-faktor yang memengaruhi penduduk di antaranya;

**a) Kelahiran (Fertilitas)**

Kelahiran dapat diartikan sebagai hasil reproduksi nyata dari seorang Wanita atau kelompok Wanita. Fertilitas merupakan taraf kelahiran penduduk yang sesungguhnya berdasarkan jumlah kelahiran yang terjadi. Hal ini digunakan untuk menunjukkan pertambahan jumlah penduduk.

**b) Kematian (Mortalitas)**

Besar kecilnya tingkat kematian suatu negara menunjukkan pengurangan jumlah penduduk. Beberapa negara memiliki tingkat kematian lebih besar dibandingkan dengan kelahiran. Sehingga negara-negara tersebut terus mengalami pengurangan penduduk. Namun berbeda dengan negara berkembang yang memiliki tingkat kematian yang cukup tinggi, namun tingkat kelahirannya lebih tinggi.

**c) Perpindahan (Migrasi)**

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan menetap dari suatu tempat ketempat lainnya. Apabila penduduk suatu negara banyak melaksanakan migrasi, maka akan berdampak pada pengurangan penduduk, sebaliknya jika negara menerima warga yang migrasi akan menambah penduduk yang ada.

Banyaknya jumlah penduduk disuatu negara atau daerah akan memberikan dampak, baik itu dampak positif atau dampak negative.

a) Dampak positif dari jumlah penduduk yang besar,yakni:

- 1) Roda ekonomi akan tumbuh pesat,
- 2) Banyak tersedia tenaga kerja usia produktif,

- 3) Merangsang pertumbuhan ekonomi,
  - 4) Pembangunan akan semakin besar,
- b) Dampak negative, dari jumlah penduduk yang besar, yakni:
- 1) Kesehatan yang kurang tercukupi,
  - 2) Banyaknya konflik yang terjadi,
  - 3) Masalah social,
  - 4) Banyaknya pengangguran.

#### 4. Wisatawan

##### 4.1 Pengertian Wisatawan

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan mendefinisikan wisatawan sebagai orang perseorangan yang melakukan perjalanan. Apabila mereka tinggal di daerah atau negara yang dikunjungi dengan waktu kurang dari 24 jam, maka mereka disebut sebagai pelancong (*excursionist*). IUOTO (*The International Union of Official Travel Organization*) menggunakan batasan pendefinisian mengenai wisatawan secara umum, yaitu pengunjung adalah setiap orang yang datang ke suatu negara atau tempat tinggal lain, dan biasanya dengan maksud apapun, kecuali untuk melakukan pekerjaan yang menerima upah. Pengunjung (*visitor*) tersebut dapat dibedakan kedalam dua kategori, yaitu :

- 1) Wisatawan (*Tourist*) adalah pengunjung yang tinggal sementara sekurang-kurangnya 24 jam di suatu negara. Wisatawan dengan maksud perjalanan wisata dapat digolongkan menjadi dua, yaitu : 1) Pesiar (*leisure*), untuk keperluan rekreasi, liburan, kesehatan, studi,

keagamaan, dan olah raga. 2) Hubungan dagang, sanak saudara, handai taulan, konferensi, misi, dan sebagainya.

2) Pelancong (*Excursionist*) adalah pengunjung sementara yang tinggal di suatu negara yang dikunjungi dalam waktu kurang dari 24 jam.

## **5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai total semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah selama periode waktu tertentu (biasanya setahun). Rumah tangga, bisnis atau organisasi nirlaba diharuskan melakukan kegiatan ekonomi/manufaktur di kawasan tersebut, misalnya dengan memiliki tanah/bangunan untuk jangka waktu tertentu (Wahyuni., 2022).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah suatu barang atau jasa yang dihitung dengan menggunakan harga tahun tertentu sebagai tahun dasar. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan digunakan untuk menentukan pertumbuhan ekonomi tahunan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu ukuran utama pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dan selama periode waktu tertentu (satu tahun), yang dihasilkan oleh semua kegiatan ekonomi di suatu negara atau wilayah.

Produk Domestik Bruto Daerah (PDRB) juga merupakan faktor penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah suatu daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga dapat merepresentasikan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya pembangunan, demikian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masing-masing daerah Tergantung potensi dan faktor produksi masing-masing daerah. Seiring dengan peningkatan

produk domestik bruto, pendapatan daerah meningkat untuk mendanai program pembangunan yang selanjutnya meningkatkan produktivitas (Jaya dan Widanta, 2014).

## B. Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris digunakan sebagai acuan dan bahan perbandingan penelitian sekarang.

**Tabel 2.1 Tinjauan Empiris**

No.	Nama Peneliti Dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Sofinattul Najjah, Luluk Fadliyanti, Dan Irwan Suriadi (2022)	Pengaruh Jumlah Objek Wisata, Hotel Dan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata Di Kabupaten Lombok Timur Periode Tahun 2010-2019	1. Jumlah Objek Wisata 2. Jumlah Hotel 3. Jumlah Wisatawan 4. Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Kab. Lombok Timur	Analisis Regresi Berganda	1. Objek Wisata Memiliki Pengaruh Positif Secara Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Kabupaten Lombok Timur 2. Hotel Memiliki Pengaruh Positif Secara Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Kabupaten Lombok Timur. 3. Wisatawan (Mancanegara Dan Nusantara) Memiliki Pengaruh Positif Secara Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

					Sektor Pariwisata Kabupaten Lombok Timur
2	Yenni Del Rosa, Ingra Sovita dan Idwar (2016)	Analisis Dampak Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Pesisir Selatan Tahun 2000-2014	1. Jumlah Objek Wisata 2. Jumlah Wisatawan 3. PDRB 4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Analisis Regresi Berganda	1. Jumlah daya tarik wisata (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Pesisir Selatan tahun 2000 sampai dengan tahun 2014. 2. Jumlah wisatawan (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Pesisir Selatan tahun 2000 sampai dengan tahun 2014 3. PDRB (X3) tidak memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Pesisir Selatan tahun 2000 sampai dengan tahun 2014.
3	Chintia Ratna Nastiti dan Susilo (2015)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Daerah	1. Produk Domestik Regional Bruto 2. Inflasi 3. Jumlah Penduduk 4. Pajak Daerah	Analisis Regresi Berganda	Pengaruh secara simultan (Bersama-sama) tiap variabel terhadap pajak daerah dilakukan, diperoleh variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pajak daerah. Tiga variabel memiliki pengaruh signifikan terhadap pajak daerah.

4	Putu Arinda Krisnayanti dan Niluh Karmini (2020)	Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali	1. Jumlah Kunjungan Wisatawan 2. Jumlah Penduduk 3. PDRB 4. Pajak Daerah	Analisis Regresi Berganda	Secara simultan jumlah kunjungan wisatawan (X1), Jumlah Penduduk (X2) dan Produk Domestik regional Bruto (X3) berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah di Wilayah Sarbatiga Provinsi Bali.
5	Aditia Abdian, Arman Delis dan Rosmeli (2017)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Kerinci	1. Produk Domestik Regional Bruto 2. Jumlah Penduduk 3. Pajak Daerah	Analisis Linear Berganda	Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah di Kabupaten Kerinci.
6	Anatoly Aditya Saputra (2018)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Cilegon	1. Produk Domestik regional Bruto 2. Jumlah Penduduk 3. Inflasi 4. Jumlah Industri 5. Penerimaan Pajak Daerah di Kota Cilegon	Analisis Regresi Sederhana	1. Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah 2. Jumlah penduduk memiliki pengaruh dominan terhadap pajak daerah. 3. Perubahan Inflasi di Kota Cilegon menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah.

					4. Jumlah Industri tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.
7	Stenly Andry Ririhena, Marcus R. Maspaitella, dan Rumas Alma Yap (2021)	Analisis Faktro-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2013-2017	1. Penerimaan Pajak Daerah 2. Pendapatan Perkapita 3. Jumlah Objek Wisata 4. Tingkat Hunian Hotel	Analisis Regresi Berganda	1. Jumlah pengunjung objek wisata berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Manokwari, dan tingkat hunian kamar hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Manokwari. Secara parsial pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Manokwari. 2. Pendapatan per kapita dan tingkat hunian kamar hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Manokwari sehingga menjadi faktor yang dominan.
8	Nina Sabrina dan Irma Mudzhalifah(2018)	Pengaruh Jumlah Objek Wisata, Jumlah Wisatawan	1. Jumlah Objek Wisata 2. Jumlah Wisatawan 3. Tingkat Hunian Hotel 4. Pendapatan Asli Daerah	Analisis regresi berganda	PAD dipengaruhi secara signifikan oleh jumlah objek wisata, Dengan Pendapatan Sektor Pariwisata sebagai variabel

		<p>dan Tingkat Hunian Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Moderating Pada Dinas Pariwisata Kota Palembang</p>			<p>moderating, jumlah atraksi wisata mempengaruhi PAD secara simultan; Penerimaan Sektor Pariwisata sebagai Variabel Pemoderasi memiliki pengaruh yang lebih lemah terhadap PAD dibandingkan Tingkat Hunian Hotel, namun tidak mampu memoderasi Jumlah Wisatawan terhadap PAD. PAD dipengaruhi secara signifikan oleh jumlah atraksi, wisatawan, dan tingkat hunian hotel sekaligus. Secara parsial, jumlah tempat wisata berpengaruh besar terhadap PAD; PAD tidak terpengaruh secara signifikan oleh jumlah wisatawan; PAD dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat hunian hotel.</p>
9	<p>Dian Purnama Sari dan Fitrawati Ilyas (2016)</p>	<p>Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah</p>	<p>1. Pendapatan Perkapita 2. Jumlah Penduduk 3. Inflasi 4. Pajak Daerah</p>	<p>Analisis Regresi Berganda</p>	<p>1. Pendapatan perkapita berpengaruh positif terhadap pajak daerah di Provinsi Bengkulu 2. Jumlah penduduk tidak berpengaruh positif</p>

		Di Provinsi Bengkulu			terhadap pajak daerah di Provinsi Bengkulu. 3. Inflasi tidak berpengaruh positif terhadap pajak daerah Provinsi Bengkulu.
10	Haris Hargo Hutomo (2016)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah	1. Jumlah Penduduk 2. Pendapatan perkapita 3. Inflasi 4. Pertumbuhan ekonomi 5. Penerimaan Pajak daerah Kabupaten Jember	Analisis Regresi Berganda	1. Jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di kabupaten Jember. 2. Pendapatan perkapita berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jember. 3. Inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jember. 4. pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jember.

### C. Kerangka Pikir

Pajak daerah merupakan salah satu sumber dari penerimaan pendapatan asli daerah. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah merupakan kontribusi yang diberikan oleh pajak daerah yang terdiri dari beberapa pajak tergantung daerah yang bersangkutan terhadap penerimaan realisasi pendaptan asli daerah di daerah tersebut.

Jumlah penduduk usia kerja dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, karena seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk usia kerja pada suatu daerah maka dapat berpotensi meningkatkan wajib pajak sehingga nantinya penerimaan pajak daerah juga meningkat. Sehingga dengan bertambahnya jumlah penduduk akan berdampak langsung pada penerimaan pajak daerah.

Obyek wisata adalah sasaran wisata dengan ciri fisik unggulan yang menarik wisatawan untuk berkunjung serta sasaran wisata dengan ciri abstrak unggulan (UU No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan).

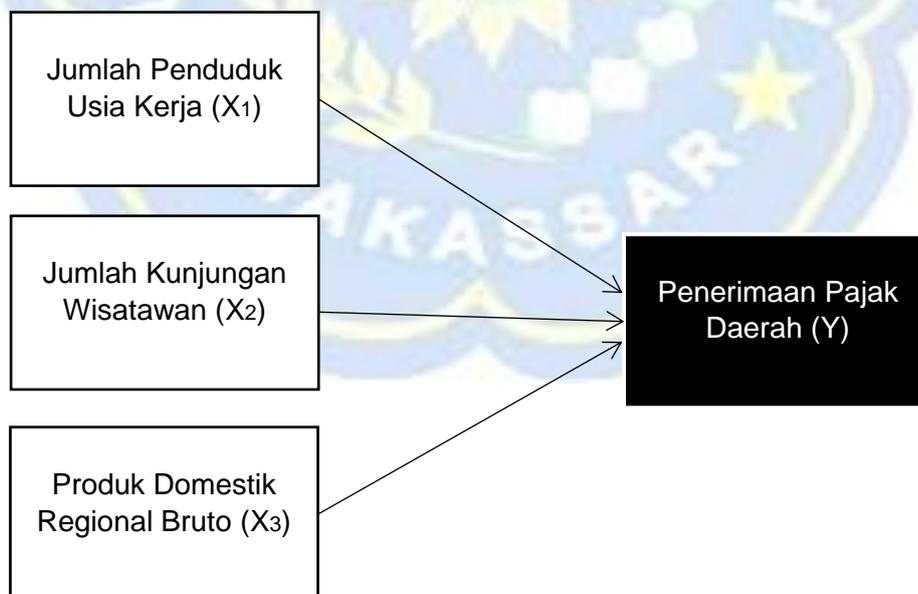
Indonesia sebagai negara yang memiliki keindahan alam serta keanekaragaman budaya yang mempunyai kesempatan untuk menjual keindahan alam dan atraksi budayanya kepada wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun nusantara yang akan menikmati keindahan alam dan budaya tersebut. Tentu saja kedatangan wisatawan tersebut akan mendatangkan penerimaan bagi daerah yang dikunjunginya. Bagi wisatawan mancanegara yang datang dari luar negeri, kedatangan mereka akan mendatangkan devisa bagi Negara (Afriani.,2015).

Jumlah wisatawan adalah masalah besar lain yang dihadapi industri pariwisata. Ada dua jenis kedatangan wisatawan yaitu wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. Sedangkan wisatawan mancanegara adalah wisatawan yang bukan berasal dari negara yang bersangkutan dan disebut sebagai wisatawan domestik. Wisatawan domestik adalah wisatawan yang berasal dari negara yang bersangkutan. Dalam sejumlah penelitian sebelumnya, jumlah wisatawan berpengaruh positif. Beberapa jenis pajak

daerah yang dapat dipungut dalam kaitannya dengan wisatawan yang berkunjung adalah pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran.

Faktor lain yang dapat berdampak pada penerimaan pajak daerah adalah Produk Domestik regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah semua barang yang diproduksi oleh suatu daerah atau daerah selama periode waktu tertentu. Salah satu metode untuk menentukan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah PDRB. Ekspansi ekonomi di suatu wilayah berkorelasi dengan nilai PDRB wilayah tersebut. Pemerintah menggunakan PDRB sebagai tolok ukur dalam menyusun kebijakan pembangunan ke depan. Terlepas dari kenyataan bahwa tarif pajak tetap tidak berubah, pertumbuhan ekonomi mengakibatkan peningkatan pemungutan pajak.

Oleh karena itu, sejauh mana pengaruh faktor-faktor tersebut akan diteliti dalam penelitian ini, yang dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian**

#### D. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:64) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Berdasarkan tujuan, tinjauan pustaka, dan kerangka konsep maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

- a. H1 : Diduga bahwa Jumlah Penduduk Usia Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Bantaeng Periode 2013-2022.
- b. H2 : Diduga bahwa Jumlah Kunjungan Wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Bantaeng Periode 2013-2022.
- c. H3 : Diduga bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Bantaeng Periode 2013-2022.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode di mana penyajian data diatur dalam bentuk numerik dan analisis data yang digunakan bersifat statistik untuk menguji hipotesis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh dari pihak lain melalui kepustakaan atau bahan bacaan lain seperti tulisan ilmiah, teori, lisan atau penelitian sejenis sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng.

#### **B. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi**

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng.

##### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada masa penyelesaian proposal ini kurang lebih dua bulan, pada bulan Mei-Juli tahun 2023.

## **C. Jenis Dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Jenis data penelitian ini adalah pengingat terbaik dari perbedaan antara keduanya. Ini sangat jelas. Data penelitian, menurut sifatnya, dapat dibagi menjadi dua bidang: kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif.

Menurut Sugiyono (2013:7) Data kuantitatif adalah data penelitian yang didasarkan pada positivisme (data konkrit), dimana data penelitian berupa nilai numerik yang diukur dengan menggunakan statistik sebagai alat penguji dan menarik kesimpulan terkait masalah yang diteliti.

### **2. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder. Husein Umar (2013:42) Data sekunder adalah data primer yang diolah oleh pengumpul data primer atau pihak ketiga dan disajikan dalam bentuk tabel, diagram, dll.

## **D. Populasi Dan Sampel**

### **1. Populasi**

Menurut Sugiyono (2013:80) Konsep populasi adalah domain umum yang terdiri dari objek/subjek dengan sifat dan karakteristik tertentu yang peneliti pelajari dan tentukan untuk menarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah data jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Bantaeng, Jumlah kunjungan wisatawan di Provinsi Bantaeng dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dibutuhkan peneliti.

## **2. Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi yang karakteristiknya diperiksa. Berdasarkan populasi yang ada, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah penduduk di Kabupaten Bantaeng, jumlah wisatawan di Kabupaten Bantaeng dan Produk Domestik Regional Bruto tahun 2013 sampai dengan tahun 2022 yang peneliti butuhkan.

## **E. Metode pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dua cara yaitu Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan.

### **1. Penelitian Kepustakaan**

Dalam penelitian kepustakaan, penulis berusaha untuk mempelajari serta mengumpulkan teori-teori dari dokumen-dokumen, hasil-hasil penelitian sebelumnya dan majalah yang ada hubungannya dengan penulisan proposal ini.

### **2. Penelitian Lapangan**

- a. Observasi, merupakan teknik melengkapi data yang diperoleh melalui pengamatan dengan melihat secara langsung objek dan mengamatinya
- b. Dokumentasi, teknik pengumpulan data dengan cara kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian.

## **F. Definisi Operasional Variabel**

Variabel bebas dan variabel terikat merupakan variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel yang dipengaruhi atau dihasilkan dari variabel independen disebut variabel dependen (terikat). Variabel bebas bebas, di sisi lain, adalah variabel yang berpengaruh pada perubahan atau penampilan variabel terikat. Jumlah penduduk usia kerja, jumlah kunjungan wisatawan, dan Poduk Domestik Regional Bruto merupakan variabel bebas dalam variabel terikat penelitian ini. Penentuan variabel pada dasarnya adalah operasionalisasi terhadap konstruk, yaitu upaya mengurangi abstraksi konstruk sehingga dapat diukur. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

### **1. Penerimaan Pajak Daerah (Y)**

Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh prang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **2. Jumlah Penduduk Usia Kerja (X1)**

Penduduk usia kerja adalah jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yang fertilitas dan migrasi yang sudah mencapai usia produktif yaitu 15-64 tahun.

### 3. Jumlah Kunjungan Wisatawan (X2)

Seberapa banyak seseorang mengadakan perjalanan untuk bersenang-senang, untuk keperluan pribadi ataupun keperluan lainnya baik itu orang asing maupun pribumi.

### 4. Produk Domestik Regional Bruto (X3)

PDRB adalah jumlah semua produk yang dihasilkan oleh suatu daerah selama periode waktu tertentu. PDRB merupakan salah satu metode untuk menentukan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.

## G. Metode Analisis Data

### 1. Analisis Regresi Berganda

Alat analisis regresi berganda dengan formulasi berikut digunakan untuk menguji hipotesis jumlah penduduk usia kerja, jumlah kunjungan wisatawan, dan PDRB yang dilaporkan sebelumnya.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

Y = Penerimaan Pajak Daerah

X1 = Jumlah Penduduk Usia Kerja

X2 = Jumlah Kunjungan Wisatawan

X3 = Produk Domestik Regional Bruto

A = Bilangan Konsanta

b1 b2 b3 = Kofesien Regresi

e = *Error*

Pendekatan pengujian statistik kemudian digunakan untuk bersama-sama dan secara individual menentukan tingkat signifikansi

pengaruh koefisien regresi dan variabel independen terhadap variabel dependen.

- a. Uji statistik t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dan suatu variabel dikatakan signifikan jika nilai t hitung lebih besar atau sama dengan nilai t tabel.
- b. Menentukan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) berganda untuk melihat seberapa besar variasi variabel dependen (Y) terhadap variabel independen ( $X_1, X_2, X_3$ ).

## 2. Uji Koefisien Determinasi

Menjelaskan betapa pentingnya variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat; semakin besar variabel independen, semakin penting peran yang dimainkannya. Nilai berkisar dari nol hingga satu.

Sejauh mana model mampu menjelaskan variabel dependen pada dasarnya diukur dengan koefisien determinasi. Uji determinasi mengikuti pedoman berikut:

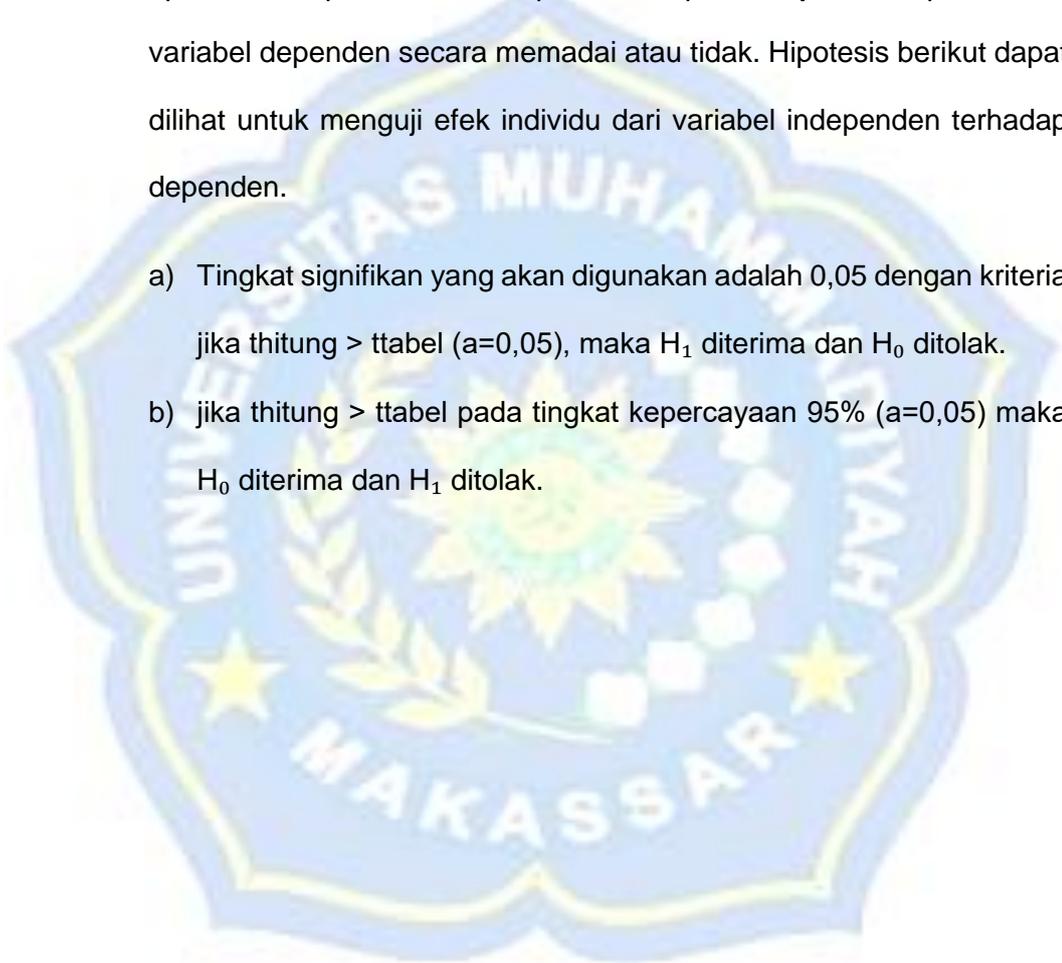
- a) Tidak ada hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat jika mendekati nol.
- b) Ada hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat jika  $R^2$  mendekati satu.

## H. Uji Hipotesis

### 1. Uji T

Tujuan pengujian ini adalah untuk memastikan apakah masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara keseluruhan. Dengan kata lain, untuk menentukan apakah setiap variabel independen dapat menjelaskan perubahan variabel dependen secara memadai atau tidak. Hipotesis berikut dapat dilihat untuk menguji efek individu dari variabel independen terhadap dependen.

- a) Tingkat signifikan yang akan digunakan adalah 0,05 dengan kriteria jika  $t_{hitung} > t_{tabel} (\alpha=0,05)$ , maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak.
- b) jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  pada tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha=0,05$ ) maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng**

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. Materi yang merupakan muatan baru dalam UU Nomor 16 Tahun 1997, antara lain:

- a. Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS.
- b. Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar

masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan.

- c. Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.
- d. Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS.

Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder
- b. Membantu kegiatan statistik di kementrian, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional.
- c. Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik.
- d. Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

### **1.1. Sejarah Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng**

Kegiatan statistik di Indonesia sudah dilaksanakan sejak masa Pemerintahan Hindia Belanda oleh . suatu lembaga yang didirikan oleh Direktur Pertanian, Kerajinan, dan Perdagangan (Directeur Van Landbouw

Nijverheld en Handel) di Bogor. Pada Februari 1920. Lembaga tersebut bertugas mengolah dan mempublikasikan data statistic. Pada 24 September 1924, kegiatan statistik pindah ke Jakarta dengan nama Centraal Kantoor Voor De Statistiek (CKS) dan melaksanakan Sensus Penduduk pertama di Indonesia pada tahun 1930. Pada masa Pemerintahan Jepang di Indonesia pada tahun 1942-1945, CKS berubah nama menjadi Shomubu Chosasitsu Gunseikanbu dengan kegiatan memenuhi kebutuhan perang/militer. Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, lembaga tersebut dinasionalisasikan dengan nama Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum Republik Indonesia (KAPPURI) dan dipimpin oleh Mr. Abdul Karim Pringgodigdo. Setelah adanya Surat Edaran Kementerian Kemakmuran tanggal 12 Juni 1950 Nomor 219/S.C., lembaga KAPPURI dan CKS dilebur menjadi Kantor Pusat Statistik (KPS) dibawah tanggung jawab Menteri Kemakmuran. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perekonomian Nomor P/44, KPS bertanggungjawab kepada Menteri Perekonomian. Selanjutnya, melalui SK Menteri Perekonomian tanggal 24 Desember 1953 Nomor IB.099/M kegiatan KPS dibagi dalam dua bagian yaitu Afdeling A (Bagian Riset) dan Afdeling B (Bagian penyelenggaraan dan Tata Usaha). Berdasarkan Keppres X nomor 172 tanggal 1 Juni 1957, KPS berubah menjadi Biro Pusat Statistik dan bertanggungjawab langsung kepada Perdana Menteri. Sesuai dengan UU No.6/1960 tentang Sensus, BPS menyelenggarakan Sensus Penduduk serentak di pada tahun 1961. Sensus Penduduk tersebut merupakan Sensus Penduduk pertama setelah Indonesia

merdeka. Sensus Penduduk di tingkat provinsi dilaksanakan oleh Kantor Gubernur, dan di tingkat Kabupaten/Kotamadya dilaksanakan oleh kantor Bupati/Walikota, sedangkan pada tingkat Kecamatan dibentuk bagian yang melaksanakan Sensus Penduduk. Selanjutnya Penyelenggara Sensus di Kantor Gubernur dan Kantor Bupati/Walikota ditetapkan menjadi Kantor Sensus dan Statistik Daerah berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor Aa/C/9 Tahun 1965. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.16/1968 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS di Pusat dan Daerah serta perubahannya menjadi PP No.6/1980, menyebutkan bahwa perwakilan BPS di daerah adalah Kantor Statistik Provinsi dan Kantor Statistik Kabupaten atau Kotamadya. Tentang Organisasi BPS ditetapkan kembali pada PP No. 2 Tahun 1992 yang disahkan pada 9 Januari 1992. Selanjutnya, Kedudukan, Fungsi, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja BPS diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1992. Pada tanggal 19 Mei 1997 ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dimana Biro Pusat Statistik diubah namanya menjadi "**Badan Pusat Statistik**". Pada Keputusan Presiden No.86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik, menetapkan bahwa perwakilan BPS di daerah merupakan Instansi Vertikal dengan nama BPS Provinsi, BPS Kabupaten, dan BPS Kotamadya. Serta pada tanggal 26 Mei 1999, ditetapkan PP Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik di Indonesia.

## 1.2. Visi dan Misi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, memperhatikan aspirasi masyarakat, potensi dan permasalahan, serta mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden maka visi Badan Pusat Statistik untuk tahun 2020-2024 adalah:

**“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”**

**(“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”)**

Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa BPS berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju.

Dengan visi baru ini, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di tingkat dunia. Dengan visi tersebut juga, semakin menguatkan peran BPS sebagai pembina data statistik.

Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan BPS, visi BPS serta melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang Ke-1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), Ke-2 (Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing) dan yang

Ke-3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

### 1.3. Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik

#### **1.4. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng**

Tugas, fungsi dan kewenangan BPS telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

##### **a. Tugas**

Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan.

##### **b. Fungsi**

- 1) Pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang statistik;
- 2) Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;
- 3) Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;
- 4) Penetapan sistem statistik nasional;
- 5) Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang kegiatan statistik; dan
- 6) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

### **c. Kewenangan**

- 1) Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- 2) Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- 3) Penetapan sistem informasi di bidangnya;
- 4) Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional;
- 5) Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu;
- 6) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik;
- 7) Penyusun pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral.

## **2. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng**

Kantor Dinas Pariwisata Kab. Bantaeng berlokasi di jantung kota Bantaeng tepatnya di Jl. Andi Manappiang No. 11 merupakan sebuah organisasi yang bergerak dibidang pelestarian cagar budaya dan kepariwisataan. Kantor ini sekarang dijabat oleh Ibu Harmoni, S. Sos, M.Si. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng ada di Kabupaten Bantaeng, yang dibentuk oleh pemerintahan daerah kabupaten Bantaeng, Pembentukan Lembaga-Lembaga Dinas dan Badan Per-Tingkat Kabupaten. Tugas besar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah melaksanakan sebagian tugas dari pemerintah daerah secara khusus kepada bidang kebudayaan dan kepariwisataan, misalnya cagar budaya, pentas seni, kegiatan adat, dan lainnya. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng juga memiliki Tiga Pilar

Pembangunan dalam menjalankan visi dan misinya, yaitu Kota Jasa, Kabupaten Benih Berbasis Teknologi, serta Pusat Pengembangan industri.

## **2.1. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng**

### **a. Visi**

Adapun Visi Dari Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng yaitu : "Mewujudkan Kabupaten Bantaeng sebagai Destinasi Wisata Unggulan diBagian Selatan Sulawesi Selatan " .

### **b. Misi**

Berdasarkan visi tersebut diatas, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng menjabarkannya dalam beberapa misi (misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bantaeng) yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kapasitas aparatur dan peningkatan kelembagaan obyek budaya dan wisata.
- 2) Kelestarian Obyek Wisata Budaya sebagai daya tarik wisatawan domestik dan mancanegara yang beretika.
- 3) Meningkatkan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan kerja sama dengan lembaga lainnya yang berbasis tekhnologi informasi.
- 4) Mengembangkan seni budaya, melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagai upaya daya tarik wisatawan domestik dan manca negara.

- 5) Melestarikan peninggalan sejarah dan nilai tradisional dalam masyarakat.

## 2.2 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng

Untuk mengetahui dan mengenal struktur organisasi biasanya dengan memperhatikan bagan organisasi, penggambaran mengenai struktur organisasi melalui bagan tersebut adalah suatu upaya untuk memperoleh gambaran yang jelas atau menyeluruh tentang obyek, atau dengan kata lain bagan tersebut dapat memperlihatkan hirarki kepemimpinan dalam suatu organisasi. Adapun struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bantaeng sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kab. Bantaeng Nomor 63 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bantaeng terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional
- 3) Sekretariat :
  - a) Subbagian Program, Pelaporan dan Keuangan
  - b) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- 4) Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
  - a) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan
- 5) Bidang Pemasaran Pariwisata
  - a) Sub Koordinator dan kelompok Jabatan

6) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

a) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan

7) Unit Pelaksana Teknis (UPT)

## B. Penyajian Data Hasil Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa laporan tahunan Badan Pusat Statistik dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng yang diperoleh dari situs resmi [bantaengkab.bps.go.id](http://bantaengkab.bps.go.id) dan observasi langsung ke lokasi penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan variabel Jumlah Penduduk Usia Kerja (X1), Jumlah Kunjungan Wisatawan (X2), Produk Domestik Regional Bruto (X3) dan Penerimaan Pajak Daerah (Y). Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Usia Kerja Kabupaten Bantaeng 2013-2022**

No	Tahun	Jumlah Penduduk Usia Kerja (X1)
1	2013	119.589
2	2014	120.880
3	2015	96.021
4	2016	96.021
5	2017	104.407
6	2018	96.826
7	2019	98.133
8	2020	105.144
9	2021	107.631
10	2022	109.924

Sumber: *Data Sekunder diolah, 2023*

**Tabel 4.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Bantaeng 2013-2022**

No	Tahun	Jumlah Kunjungan Wisatawan (X2)
1	2013	44.778
2	2014	82.128
3	2015	80.016
4	2016	73.699
5	2017	76.971
6	2018	90.340
7	2019	87.626
8	2020	67.733
9	2021	70.687
10	2022	90.214

Sumber: *Data Sekunder diolah,2023*

**Tabel 4.3 PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bantaeng atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2013 - 2022 (Juta Rupiah)**

No	Tahun	Produk Domestik Regional Bruto (X3)
1	2013	3.525.611,95
2	2014	3.819.275,75
3	2015	4.073.059,72
4	2016	4.374.214,69
5	2017	4.694.158,30
6	2018	5.075.836,51
7	2019	5.621.523,48
8	2020	5.650.535,16
9	2021	6.151.446,96
10	2022	7.102.036,91

Sumber: *Data Sekunder diolah,2023*

**Tabel 4.4 Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013-2022**

No	Tahun	Penerimaan Pajak Daerah (Y)
1	2013	4.183.000.000
2	2014	7.933.482.959
3	2015	7.405.930.730
4	2016	8.018.004.306
5	2017	10.182.544.016
6	2018	11.610.612.835
7	2019	18.361.699.088,50
8	2020	24.365.468.093,70
9	2021	17.357.428.625,50
10	2022	7.003.491.313

Sumber: *Data Sekunder diolah,2023*

### 1) Regresi Linear Berganda

Persamaan regresi dapat dilihat dari hasil uji coefisient berdasarkan output SPSS terhadap ketiga variabel yaitu jumlah penduduk, usia kerja jumlah kunjungan wisatawan dan Produk Domestik Regional Bruto ditunjukkan pada tabel 4.5 :

Tabel 4.5 Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.592	7.505		.612	.563
	Jumlah Penduduk Usia Kerja	.055	.022	.718	2.467	.049
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	.043	.015	1.103	2.893	.028
	PDRB	1.609	.403	1.152	3.993	.007

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah

Sumber: *Output SPSS data diolah, 2023*

Maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y : 4.592 + .005X_1 + .043X_2 + 1.609X_3 + e$$

Hasil dari persamaan regresi dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai koefisien  $\beta_0$  sebesar 4.592, artinya jika jumlah penduduk usia kerja ( $X_1$ ), jumlah kunjungan wisatawan ( $X_2$ ) dan Produk Domestik Regional Bruto ( $X_3$ ) sama dengan nol maka penerimaan pajak daerah akan mengalami kenaikan sebesar 4.592.
2. Nilai koefisien  $\beta_1$  sebesar .055, menyatakan bahwa setiap penambahan jumlah penduduk usia kerja maka akan menyebabkan peningkatan penerimaan pajak daerah sebesar 0,055%. Dan sebaliknya jika jumlah penduduk usia kerja berkurang maka akan menyebabkan penurunan penerimaan pajak daerah sebesar

0,055%. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan dependen.

3. Nilai koefisien  $\beta_2$  sebesar .043, menyatakan bahwa setiap penambahan jumlah kunjungan wisatawan maka akan menyebabkan peningkatan penerimaan pajak daerah sebesar 0,043%. Dan sebaliknya jika jumlah kunjungan wisatawan berkurang maka akan menyebabkan penurunan penerimaan pajak daerah sebesar 0,043%. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan dependen.

4. Nilai koefisien  $\beta_3$  sebesar 1.069, menyatakan bahwa setiap penambahan Produk Domestik Regional Bruto maka akan menyebabkan peningkatan penerimaan pajak daerah sebesar 1,069%. Dan sebaliknya jika Produk Domestik Regional Bruto berkurang maka akan menyebabkan penurunan penerimaan pajak daerah sebesar 1,069 %. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan dependen.

## 2) Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.884 <sup>a</sup>	.782	.673	.30518

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber: *Output SPSS data diolah, 2023*

Berdasarkan hasil olahan data menggunakan SPSS, terlihat bahwa koefisien determinasi atau nilai  $R^2$  sebesar 0,673 memiliki arti bahwa 67,3 persen variabel dari pajak daerah dijelaskan oleh variabel

jumlah penduduk usia kerja, jumlah kunjungan wisatawan, dan Produk Domestik Regional Bruto yang ada dipenelitian ini sedangkan 32,7 persen dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini.

### 3) Uji Hipotesis

#### a. Uji t

Tabel 4.3 menunjukkan pengaruh secara parsial variabel jumlah penduduk usia kerja, jumlah kunjungan wisatawan, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap penerimaan pajak daerah dapat dilihat dari t hitung. Hasil pengujian hipotesis variabel independent secara parsial terhadap variabel dependennya dapat dianalisis sebagai berikut:

#### 1. Pengaruh jumlah penduduk usia kerja terhadap penerimaan pajak daerah

Pada tabel 4.5 hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikan pengaruh jumlah penduduk usia kerja (X1) terhadap penerimaan pajak daerah (Y) adalah  $0.049 < 0,05$  dan nilai t hitung  $2.467 >$  nilai t tabel 1.943. Artinya variabel jumlah penduduk usia kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

#### 2. Pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap penerimaan pajak daerah

Pada tabel 4.5 hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikan pengaruh jumlah kunjungan wisatawan (X2) terhadap penerimaan

pajak daerah (Y) adalah  $0.028 < 0,05$  dan nilai t hitung  $2.893 >$  nilai t tabel  $1.943$ . Artinya variabel jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

### **3. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap penerimaan pajak daerah**

Pada tabel 4.5 hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikan Produk Domestik Regional Bruto (X3) terhadap penerimaan pajak daerah (Y) adalah  $0.007 < 0,05$  dan nilai t hitung  $3.993 >$  nilai t tabel  $1.943$ . Artinya variabel Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

## **C. Analisis dan Interpretasi (Pembahasan)**

Berdasarkan hasil pengujian variabel yang telah dilakukan sebelumnya, maka ada beberapa hal yang dapat dijelaskan diantaranya sebagai berikut:

### **1. Pengaruh Jumlah Penduduk usia kerja terhadap Penerimaan Pajak Daerah**

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel jumlah penduduk lebih kecil dari syarat signifikan yang ditemukan ini berarti variabel jumlah penduduk usia kerja ini signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bantaeng. Berdasarkan nilai koefisien regresi dari jumlah penduduk usia kerja bahwa adanya peningkatan jumlah penduduk, maka akan diikuti dengan kenaikan penerimaan pajak daerah dengan asumsi variabel

lainnya konstan, karena koefisien regresi bertanda positif. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikan pengaruh jumlah usia kerja penduduk ( $X_1$ ) terhadap penerimaan pajak daerah ( $Y$ ) adalah  $0.049 < 0,05$  dan nilai t hitung  $2.467 >$  nilai t tabel  $1.94318$ . Artinya variabel jumlah penduduk usia kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Chintia Ratna Nastiti dan Susilo (2015) menyatakan bahwa jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak karena disebabkan oleh bertambahnya potensi jumlah penduduk untuk memanfaatkan fasilitas – fasilitas yang dikenai pajak daerah. Jadi dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka potensi jumlah wajib pajak juga akan semakin besar, sehingga variabel jumlah penduduk berpengaruh pada penerimaan pajak daerah.

## **2. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Penerimaan Pajak Daerah**

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel jumlah kunjungan wisatawan lebih kecil dari syarat signifikan yang ditemukan ini berarti variabel jumlah kunjungan wisatawan ini signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bantaeng. Berdasarkan nilai koefisien regresi dari jumlah kunjungan wisatawan bahwa adanya peningkatan jumlah wisatawan, maka akan diikuti dengan kenaikan penerimaan pajak daerah dengan asumsi variabel lainnya konstan, karena koefisien regresi bertanda positif. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikan pengaruh jumlah

kunjungan wisatawan (X2) terhadap penerimaan pajak daerah (Y) adalah  $0.028 < 0,05$  dan nilai t hitung  $2.893 >$  nilai t tabel  $1.94318$ . Artinya variabel jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Putu Arinda (2020) menyatakan bahwa jumlah wisatawan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di wilayah Sarbatiga, Bali. Wisatawan baik domestik maupun mancanegara senantiasa akan membelanjakan uangnya yang dibawa untuk keperluan akomodasi, makan minum, atau membeli cendramata. Semakin banyak wisatawan yang berkunjung akan mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi di sekitar objek wisata dan secara tidak langsung ikut berkontribusi dalam peningkatan pajak daerah pada masing – masing daerah.

### **3. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penerimaan Pajak Daerah**

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel produk domestik regional bruto lebih kecil dari syarat signifikan yang ditemukan ini berarti variabel produk domestik regional bruto dalam penelitian ini signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bantaeng. Berdasarkan nilai koefisien regresi dari produk domestik regional bruto bahwa setiap adanya peningkatan produk domestik regional bruto, maka akan diikuti dengan kenaikan penerimaan pajak daerah dengan asumsi variabel lainnya konstan. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikan Produk Domestik Regional Bruto (X3) terhadap penerimaan pajak daerah (Y) adalah  $0.007 < 0,05$  dan nilai t

hitung  $3.993 >$  nilai t tabel 1.94318. Artinya variabel Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Aditia Abdian (2017) menyatakan bahwa produk domestik regional bruto merupakan salah satu faktor yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di kabupaten Kerinci.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil uji t pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai signifikan pengaruh jumlah penduduk usia kerja (X1) terhadap penerimaan pajak daerah (Y) adalah  $0.049 < 0,05$  dan nilai t hitung  $2.467 >$  nilai t tabel 1.943. Artinya variabel jumlah penduduk usia kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.
2. Hasil uji t pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai signifikan pengaruh jumlah kunjungan wisatawan (X2) terhadap penerimaan pajak daerah (Y) adalah  $0.028 < 0,05$  dan nilai t hitung  $2.893 >$  nilai t tabel 1.943. Artinya variabel jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.
3. Hasil uji t pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai signifikan Produk Domestik Regional Bruto (X3) terhadap penerimaan pajak daerah (Y) adalah  $0.007 < 0,05$  dan nilai t hitung  $3.993 >$  nilai t tabel 1.943. Artinya variabel Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah :

1. Jumlah penduduk usia kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah salah satunya melalui pajak hiburan. Agar lebih signifikan, diharapkan pemerintah dapat memajukan kesejahteraan penduduk dengan mengurangi pengangguran agar masyarakat dapat lebih produktif dalam membayar pajak.
2. Jumlah kunjungan wisatawan dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pajak daerah, maka perlu upaya – upaya untuk menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Bantaeng. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui pembenahan tempat – tempat wisata, pembangunan tempat – tempat wisata baru, melakukan promosi, melakukan kerja sama dengan biro perjalanan, dan lain – lain.
3. Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Agar lebih signifikan perlu ditingkatkan sektor – sektor Produk Domestik Regional Bruto baik yang berhubungan langsung maupun tidak yang berhubungan dengan penerimaan pajak. Sehingga dapat menarik investor untuk membangun usaha di Kabupaten Bantaeng.
4. Untuk penulis selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan penelitian ini untuk melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bantaeng.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal,M,N. dkk. 2015. Dampak Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, dan PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Hotel. *Jurnal Sain Manajemen*. Vol. 1 No. 1
- Antika,N,F., dkk. 2020. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kudus Selama Pandemi Covid-19. In *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi (Vol. 5, No. 1, pp. 408-417)*.
- Ayem, S., dan Hamrin, S. 2021. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Retribusi Obyek Wisata, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*. Vol.4,No. 1.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng. 2022. *Kabupaten Bantaeng dalam Angka 2022*. BPS Kabupaten Bantaeng: Bantaeng.
- Harsoyo. 2021. Analisis Potensi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dari Sektor Pariwisata Kota Semarang. *JESYA: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*. Vol. 4, No. 2.
- Krisnayanthi,A,P,. dkk. 2020. Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 9 [8] : 1861 - 1887
- Mahsunah,Durrotul. 2013. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. Vol. 1 No 3.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Penerbit Andi: Yogyakarta
- Marliyanti,D,S., dan Arka, S. 2014. Pengaruh PDRB terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Vol.3,No. 6.
- Najjah, S., dkk. 2022. Pengaruh Jumlah Objek Wisata, Hotel Dan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata Di Kabupaten Lombok Timur Periode Tahun 2010-2019. *Jurnal Konstanta*. Vol 1. , No. 1.
- Nurwahidah., dan Abidin Z. 2021. Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa Dan Sumatera. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*. Vol.4,No. 2.
- Natsir,A,A. 2016. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. *Skripsi. Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar*.

- Pertiwi, Ni Luh Gde Ana. 2014. Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Retribusi Obyek Wisata Dan PHR Terhadap PAD Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal EP Unud. Vol. 3, No. 3: 115–123.*
- Ririhena,A,S., dkk. 2021. Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Manokwari Tahun 2013 – 2017. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE). Vol. 5, No. 3.*
- Rualiaty., dkk. 2018. Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan. Vol.1,No. 8.*
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.* Penerbit Alfabeta: Bandung
- Sania,H dkk. 2018. Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Perpajakan,Manajemen dan Akuntansi. Vol. 9, No 2.*
- Sunarto., dan Fatimah,N,A,D,R. Pengaruh Penerimaan Retribusi dan Penetapan Tarif Obyek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2013-2015. *Jurnal Akuntansi. Vol. 4, No. 2.*
- Saputra, D., dkk. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten tulungagung). *Jurnal Perpajakan. Vol. 3,No 1.6*
- Tahwin, Muhammad. 2013. Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal Studi Ekonomi. Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ‘YPPI’ Rembang. Vol. 18, No 2.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.*
- Widiyanti,N dan Dewanti,D,S. 2017. Analisis Pengaruh Jumlah Objek Wisata, PDRB, Jumlah Hotel ,Jumlah Restoran, dan Rumah Makan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2015. *Jurnal of Economics Research and Social Sciences, Vol 1, No 2.*

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



**b. Data Hasil Penelitian**

**1. Data Jumlah Penduduk Usia Kerja 2013-2022**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk Usia Kerja (X1)</b>
1	2013	119.589
2	2014	120.880
3	2015	96.021
4	2016	96.021
5	2017	104.407
6	2018	96.826
7	2019	98.133
8	2020	105.144
9	2021	107.631
10	2022	109.924

**2. Data Jumlah Kunjungan Wisatawan 2013-2022**

<b>JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN BERDASARKAN PAD DINAS PARIWISATA TAHUN 2013 - 2022</b>	
<b>TAHUN</b>	<b>TOTAL WISATAWAN</b>
<b>2013</b>	<b>44,778</b>
<b>2014</b>	<b>82,128</b>
<b>2015</b>	<b>80,016</b>
<b>2016</b>	<b>73,699</b>
<b>2017</b>	<b>76,971</b>
<b>2018</b>	<b>90,340</b>
<b>2019</b>	<b>87,626</b>
<b>2020</b>	<b>67,733</b>
<b>2021</b>	<b>70,687</b>
<b>2022</b>	<b>90,214</b>

### 3. Data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bantaeng

TABEL 2. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA KABUPATEN BANTAENG ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 TAHUN 20

Kategori	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *	2022 **
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.223.727,75	1.302.071,37	1.307.023,13	1.411.061,29	1.489.989,55	1.565.707,69	1.636.812,07	1.635.812,66	1.707.168,27	1.713.142,21
B	Pertambangan dan Pengalihan	80.122,93	90.381,00	116.968,93	130.111,13	143.976,76	158.268,97	166.152,61	176.796,30	187.791,12	196.434,24
C	Industri Pengolahan	155.316,24	182.074,78	196.857,28	205.936,63	218.785,18	258.132,61	435.857,43	394.444,20	567.068,35	1.263.918,72
D	Pengadaan Listrik, Gas	4.410,41	4.895,06	5.481,93	5.970,86	6.383,99	6.749,60	10.097,39	9.859,06	16.691,10	38.021,21
E	Pengadaan Air	3.999,89	3.328,30	3.369,40	3.785,37	4.032,04	4.269,62	4.522,28	4.689,43	4.694,69	4.890,49
F	Konstruksi	530.466,10	576.715,82	600.443,33	643.735,28	713.149,85	777.818,98	840.114,58	842.009,17	934.932,27	977.978,48
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	507.347,09	564.147,90	657.076,73	693.871,69	761.087,12	836.709,06	926.042,68	903.814,73	970.088,53	1.062.617,87
H	Transportasi dan Pergudangan	41.781,12	45.889,88	83.948,62	54.913,89	56.190,79	61.812,83	67.028,80	64.219,54	68.578,66	77.400,01
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	24.540,11	29.746,23	33.147,85	34.429,05	38.358,87	42.661,36	46.152,46	48.487,67	50.776,78	58.368,95
J	Informasi dan Komunikasi	97.987,30	109.516,28	163.310,48	126.989,69	137.285,72	150.839,06	165.743,55	195.858,35	207.747,59	222.404,79
K	Jasa Keuangan	82.856,24	88.107,70	83.155,82	105.681,28	100.358,38	115.167,24	120.594,58	130.343,95	138.365,89	140.464,11
L	Real Estate	183.678,18	208.915,25	231.445,77	240.251,74	247.454,26	259.575,48	278.390,40	297.221,79	311.847,79	326.235,79
M,N	Jasa Perusahaan	4.799,44	5.822,02	5.337,88	5.635,56	5.997,28	6.688,32	7.046,50	6.821,90	7.077,68	7.916,15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	241.279,89	248.553,54	258.165,32	290.865,66	306.929,92	338.913,88	380.713,54	377.521,35	380.648,93	378.835,97
P	Jasa Pendidikan	215.274,71	222.017,89	232.017,89	253.004,55	278.456,97	296.546,67	323.588,22	335.833,81	351.582,39	366.680,09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	81.005,56	90.522,04	105.947,41	106.508,21	110.110,07	120.516,69	130.284,74	152.402,43	164.385,58	177.218,24
R,S,T,U	Jasa lainnya	48.716,99	53.870,76	59.442,82	61.463,78	66.691,60	75.537,65	82.481,96	75.189,41	82.002,14	89.509,58
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>3.525.611,95</b>	<b>3.819.275,75</b>	<b>4.073.059,72</b>	<b>4.374.214,69</b>	<b>4.694.158,30</b>	<b>5.075.836,51</b>	<b>5.621.523,48</b>	<b>5.650.535,16</b>	<b>6.151.446,96</b>	<b>7.102.836,91</b>

\* : Angka Sementara  
\*\* : Angka Sangat Sementara

#### c. T tabel

dk	$\alpha$ untuk Uji Satu Pihak ( <i>one tail test</i> )					
	0,25	0,10	0,05	0,025	0,01	0,005
	$\alpha$ untuk Uji Dua Pihak ( <i>two tail test</i> )					
	0,50	0,20	0,10	0,05	0,02	0,01
1	1,000	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657
2	0,816	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925
3	0,765	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841
4	0,741	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604
5	0,727	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032
6	0,718	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707
7	0,711	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499
8	0,706	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355
9	0,703	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250
10	0,700	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169
11	0,697	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106
12	0,695	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055
13	0,692	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012
14	0,691	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977
15	0,690	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947
16	0,689	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921
17	0,688	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898
18	0,688	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878
19	0,687	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861
20	0,687	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845
21	0,686	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831
22	0,686	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819
23	0,685	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807
24	0,685	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797
25	0,684	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787
26	0,684	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779
27	0,684	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771
28	0,683	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763
29	0,683	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756
30	0,683	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750
40	0,681	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704
60	0,679	1,296	1,671	2,000	2,390	2,660
120	0,677	1,289	1,658	1,980	2,358	2,617
$\infty$	0,674	1,282	1,645	1,960	2,326	2,576

#### d. Output Hasil Penelitian Menggunakan SPSS

##### i. Hasil Uji Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.884 <sup>a</sup>	.782	.673	.30518

a. Predictors: (Constant), X3\_LN, X1, X2

##### ii. Hasil Uji t

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.592	7.505		.612	.563
	Jumlah Penduduk Usia Kerja	.055	.022	.718	2.467	.049
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	.043	.015	1.103	2.893	.028
	PDRB	1.609	.403	1.152	3.993	.007

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah

#### e. Dokumentasi



## f. Dokumen-Dokumen Penelitian

### i. Surat Pengantar Fakultas



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 607/05/A-2-II/V/44/2023 Makassar, 02-Mei-2023

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

**Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar**

Di-

Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Fitria Rahman

Stambuk : 105711105319

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Judul Penelitian : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bantaeng

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuanya diucapkan terimakasih.



*Tembusan:*

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Arsip

## ii. Surat Pengantar Universitas



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail lp3m@unismuh.ac.id

---

Nomor : 1401/05/C.4-VIII/V/1444/2023 13 Syawal 1444 H  
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 03 May 2023 M  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,  
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel  
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan  
 di -  
 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 607/05/A.2-II/V/44/2022 tanggal 2 Mei 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **FITRIA RAHMAN**  
 No. Stambuk : **10571 1105319**  
 Fakultas : **Fakultas Ekonomi dan Bisnis**  
 Jurusan : **Ekonomi Pembangunan**  
 Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BANTAENG"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 9 Mei 2023 s/d 9 Juli 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.  
 Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,  
  
**Dr. H. Abubakar Idhan, MP.**  
**NBM 101 7716**

05-23

### iii. Surat Pengantar PTSP Provinsi



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231

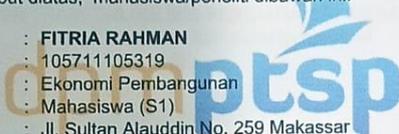
---

Nomor	: <b>16357/S.01/PTSP/2023</b>	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Bantaeng
Perihal	: <u><b>Izin penelitian</b></u>	

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1401/05/C.4-VIII/V/1444/2023 tanggal 03 Mei 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: <b>FITRIA RAHMAN</b>
Nomor Pokok	: 105711105319
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar



PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BANTAENG "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **12 Mei s/d 12 Juli 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 12 Mei 2023

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**Drs. MUH SALEH, M.Si.**  
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA  
 Nip : 19690717 199112 1002

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

#### iv. Surat Pengantar PTSP Kabupaten Bantaeng



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**  
Alamat : Jl. Kartini No. 2, Kab. Bantaeng, email : dpmptsp.bantaengkab@gmail.com, website : dpmptsp.bantaengkab.go.id

---

**IZIN PENELITIAN**  
 NOMOR : 500.16.7/158/IPL/DPM-PTSP/VI/2023

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
3. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama	: FITRIA RAHMAN
Jenis Kelamin	: Perempuan
N I M	: 105711105319
No. KTP	: 7303016702020002
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan
Pekerjaan	: Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat	: Kamp. Beru Kel. Bonto Atu Kec. Bissappu Kabupaten Bantaeng

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :  
**" Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bantaeng "**

Lokasi Penelitian	: Badan Pusat Statistik Bantaeng, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng
Lama Penelitian	: 12 Mei 2023 s.d. 12 Juli 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudahnya melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan harus melapor kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat- istiadat Daerah setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil Penelitian kepada Bupati Bantaeng Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bantaeng;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



1202319009000170



Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng  
 Pada tanggal : 13 Juni 2023  
**a.n. BUPATI BANTAENG**

Dinas Penanaman Modal dan PTSP



**YOHANIS PHR ROMUTI, S.IP**  
 Pangkat : Pembina TK.I, IV/b

## v. Surat Izin Melakukan Penelitian



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BANTAENG**



Bantaeng, 14 Juni 2023

### SURAT IZIN MELAKUKAN PENELITIAN

No. B-129/73030/HM.300/06/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng, memberikan izin kepada:

Nama : Filria Rahman  
NIM : 105711105319  
Prodi : Ekonomi Pembangunan  
Universitas : Universitas Muhammadiyah Makassar

Untuk melakukan penelitian di Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir dengan Judul "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bantaeng". Kegiatan tersebut dilaksanakan mulai tanggal 12 Mei s.d 12 Juli 2023.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantaeng, 14 Juni 2023

Kepala Badan Pusat Statistik  
BPS Kabupaten Bantaeng



**Lukitoningtyas, S.ST, M.Si**  
NIP.19790117 200012 2 002



Jl. Merpati No. 19 Bantaeng (92411) Telepon : 0413-21072  
e-mail : [bps7303@bps.go.id](mailto:bps7303@bps.go.id), website : <http://bantaengkab.bps.go.id>

\* Dokumen ini telah diselesaikan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Nasional Elektronik (BNE), BSN  
\* Pindai kode QR di samping untuk verifikasi keaslian

## vi. Surat Telah Melakukan Penelitian



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BANTAENG**



Bantaeng, 14 Juni 2023

**SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

No. B-130/73030/HM.300/06/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng, menerangkan bahwa:

Nama : Fitria Rahman  
 NIM : 105711105319  
 Prodi : Ekonomi Pembangunan  
 Universitas : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah melakukan penelitian di Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir dengan Judul "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bantaeng". Kegiatan tersebut dilaksanakan mulai tanggal 12 Mei s.d 12 Juli 2023.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantaeng, 14 Juni 2023

Kepala Badan Pusat Statistik  
BPS Kabupaten Bantaeng



**Lukman Hakim, S.ST, M.Si**  
 NIP.19790117 200012 2 002

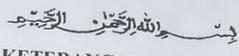


Jl. Merpati No. 19 Bantaeng (92411) Telepon : 0413-21072  
 e-mail : [bps7303@bps.go.id](mailto:bps7303@bps.go.id), website : <http://bantaengkab.bps.go.id>

\* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), BSSN  
 \* Pinisi kode QR di samping untuk verifikasi keaslian

## vii. Surat Keterangan Bebas Plagiasi


**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**  
 Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax: (0411) 865588

  
**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
 Menegaskan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Fitria Rahman  
 Nim : 105711105319  
 Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
 Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	0 %	10 %
2	Bab 2	2 %	25 %
3	Bab 3	6 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 24 Juli 2023  
 Mengetahui,  
 Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

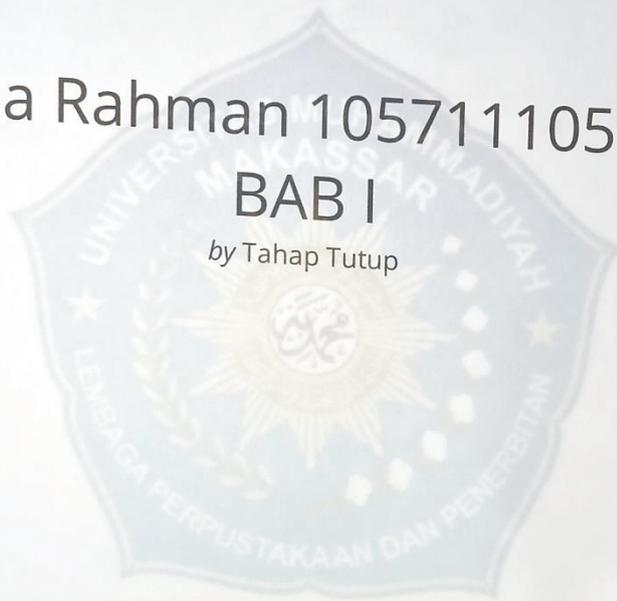
  
 Fursifah Nuraini, M.I.P.  
 NPM. 984091

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222  
 Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588  
 Website: [www.library.unismuh.ac.id](http://www.library.unismuh.ac.id)  
 E-mail : [perpustakaan@unismuh.ac.id](mailto:perpustakaan@unismuh.ac.id)

Fitria Rahman 105711105319

## BAB I

by Tahap Tutup



**Submission date:** 24-Jul-2023 10:30AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2135803652

**File name:** BAB\_I\_-\_2023-07-24T112949.226.docx (79.29K)

**Word count:** 1908

**Character count:** 12529

Fitria Rahman 105711105319 BAB I

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



Fitria Rahman 105711105319

## BAB II

by Tahap Tutup



**Submission date:** 24-Jul-2023 10:31AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2135804675

**File name:** BAB\_II\_-\_2023-07-24T112948.052.docx (184.38K)

**Word count:** 2901

**Character count:** 18929

Heria Rahman 105711105319 BAB li

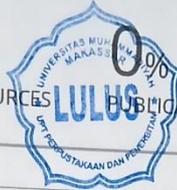
ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES



PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jurnal.fe.unram.ac.id  
Internet Source

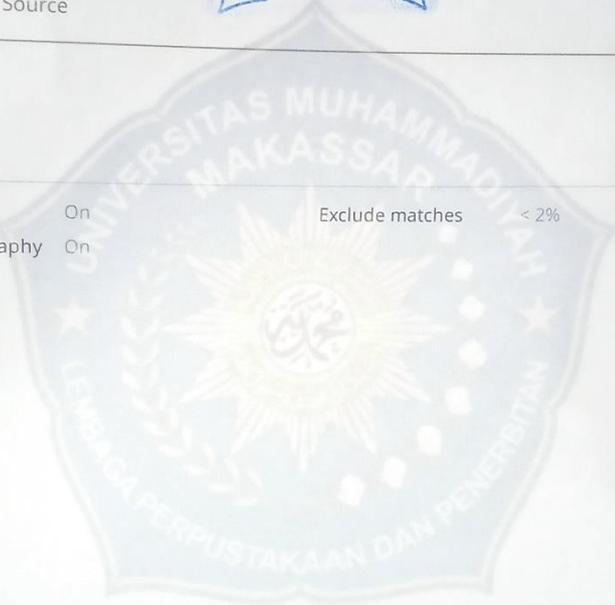


2%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

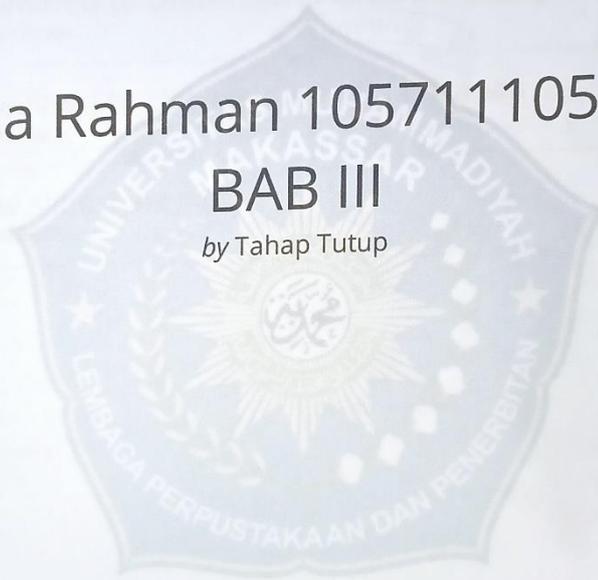
Exclude bibliography  On



Fitria Rahman 105711105319

## BAB III

by Tahap Tutup



**Submission date:** 24-Jul-2023 10:39AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2135812245

**File name:** BAB\_III\_-\_2023-07-24T112949.891.docx (17.57K)

**Word count:** 1011

**Character count:** 6454

ria Rahman 105711105319 BAB III

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas PGRI Palembang  
Student Paper

2%

2

Submitted to Universitas Pelita Harapan  
Student Paper

2%

3

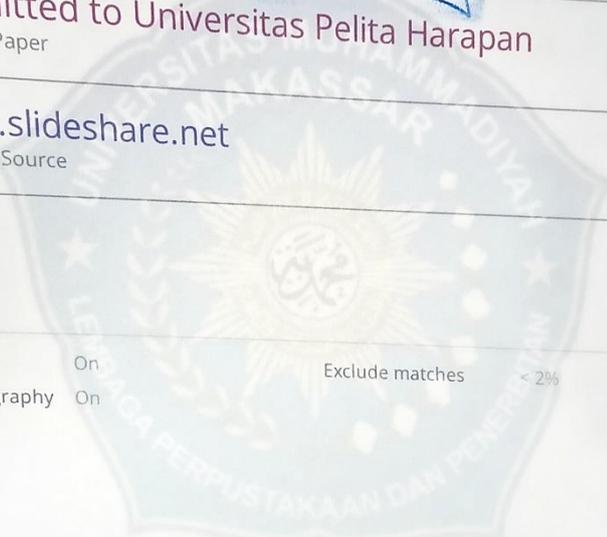
www.slideshare.net  
Internet Source

2%

Exclude quotes On  
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

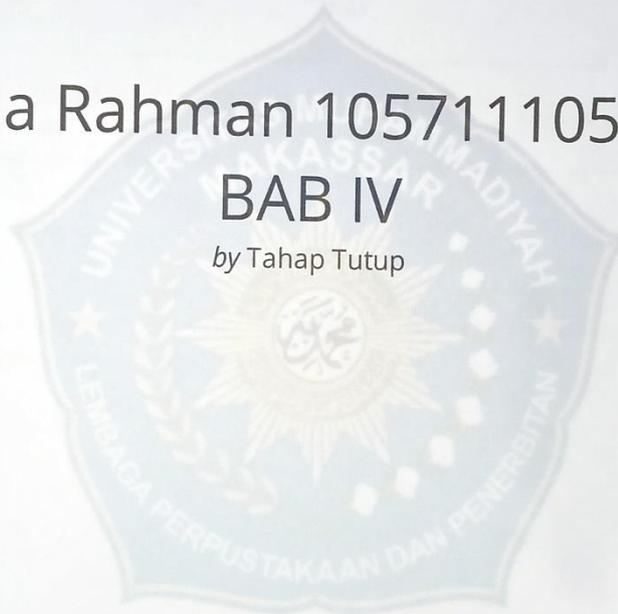
S  
S  
F  
M  
CI



Fitria Rahman 105711105319

## BAB IV

by Tahap Tutup



**Submission date:** 24-Jul-2023 10:57AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2135833329

**File name:** BAB\_IV\_-\_2023-07-24T112950.370.docx (180.22K)

**Word count:** 3105

**Character count:** 19837

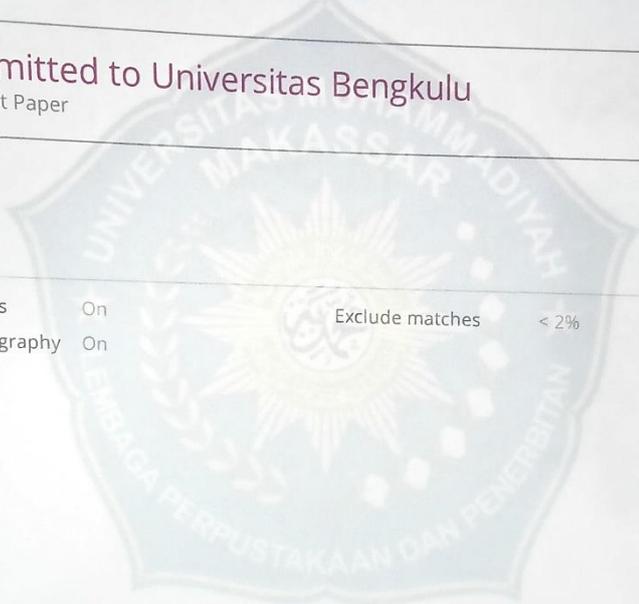
Fitria Rahman 105711105319 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

<b>9%</b>	<b>8%</b>	<b>0%</b>	<b>7%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
<b>1</b>	bps.go.id Internet Source		<b>7%</b>
<b>2</b>	Submitted to Universitas Bengkulu Student Paper		<b>2%</b>

Exclude quotes  On      Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On



Fitria Rahman 105711105319

## BAB V

by Tahap Tutup



**Submission date:** 24-Jul-2023 10:57AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2135834483

**File name:** BAB\_V\_-\_2023-07-24T112948.324.docx (14.85K)

**Word count:** 527

**Character count:** 3291

Fitria Rahman 105711105319 BAB V

ORIGINALITY REPORT

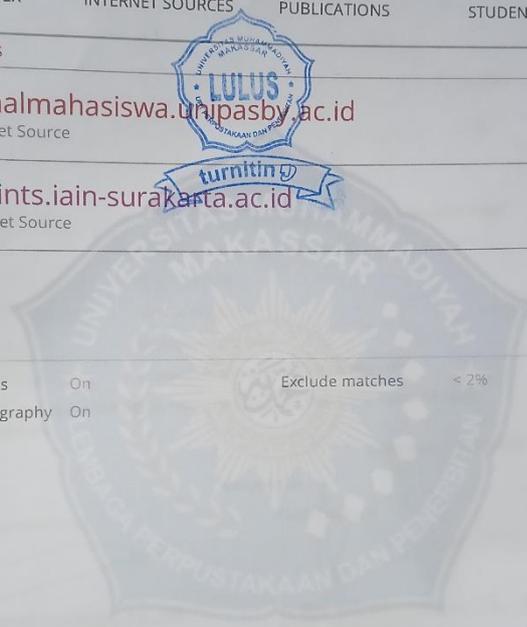
5%	5%	5%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnalmahasiswa.unipasby.ac.id Internet Source	4%
2	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes  On      Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On



## BIOGRAFI PENULIS



**Fitria Rahman**, lahir di Bantaeng pada tanggal 12 Februari 2002 dari pasangan suami istri Bapak Rahman dan Ibu Kasnia. Peneliti adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Peneliti bertempat tinggal di Kampung Beru Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri 22 Beloparang tamat pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Bissappu tamat pada tahun 2016. Selanjutnya melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Bantaeng dan selesai pada tahun 2019. Peneliti kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan mengambil Program Studi Ekonomi Pembangunan